

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi musaqah pada perkebunan semangka di Kecamatan Tampan dan tinjauan ekonomi ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani perkebunan semangka Kecamatan Tampan.

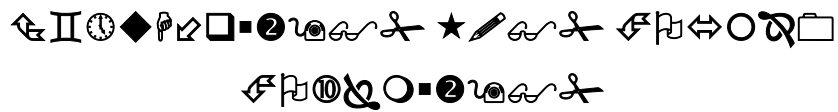
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi musaqah pada kebun semangka di Kecamatan tampan, untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap imlementasi musaqah dalam usaha agribisnis pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan.

Subjek dalam penelitian adalah pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi musaqah dalam usaha agribisnis anatara pemilik kebun semangka dan petani. Populasi dalam ini adalah seluruh pemilik kebun semangka dan petani yang melakukan kerjasama bagi hasil musaqah dengan jumlah pemilik kebun semangka yaitu 7 orang dan petani yang bekerja berjumlah 11 orang, total keseluruhan berjumlah 18 orang. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemilik kebun dan petani yang bekerja, dengan cara observasi langsung dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan dapat disimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani modal ditanggung oleh pemilik kebun, petani hanya bertanggungjawab pada pemeliharaan dan perawatan, bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba hasil panen. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan Syariat Islam akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah telah melimpahkan berkah, rahmat, nikmat kesehatan, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM USAHA AGRIBISNIS ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karna atas perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat hidup di zaman yang berintelektualitas dan dalam masa modernisasi Islam yang maju seperti di kampus madani UIN SUSKA RIAU Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak sehingga selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terutama kepada yang teristimewa Ayahanda (KHAIRUNNAS) dan Ibunda (NURAINI) serta abangku Herijon, Syafrizal, Edi Azwar. Kakakku Liza Wati, Ema Yuni, serta adik-adikku Sri Mariani, Atika Azharo dan Aminah Aini atas motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, bapak Dr. H. Akhbarizan, MAg beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Mawardi, M.si beserta Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag.
4. Bapak Dr.H. Helmi Basri, LC.MA selaku Dosen pembimbing dan Dosen Konsultasi penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Pardi Syasuddin, MA selaku Penasehat Akademis (PA)
6. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada seluruh pemilik kebun semangka dan petani yang telah membantu penulis memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis.
9. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan berupa materi, motivasi, dan mendo'akan serta memberikan kasih sayang yang begitu tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat sahabat-sahabatku yang sama-sama berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Rika Apriyanti, Putri Patma Wati, Paragawati, Een Putri Masyuri, Dwi Ratna Sari, Ulfa Hasanah. serta teman-teman di jurusan Ekonomi Islam lokal 4 angkatan 2009.

11. Kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang belum penulis sebutkan diatas.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga do'a, motivasi, perhatian dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT, *amiiiiiin*. Terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juni 2013

Penulis,

ALMAIDAH SARI
Nim: 10925006522

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografi.....	14
B. Penduduk.....	16
C. Perekonomian.....	17
D. Pendidikan.....	18
E. Keagamaan.....	19
F. Daftar Nama Pemilik Kebun Semangka	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUSAQAH DAN AGRIBISNIS	
A. Pengertian Musaqah	22
B. Dasar Hukum Musaqah.....	24
C. Rukun dan Syarat Musaqah	27
D. Tugas Penggarap	30
E. Perbedaan antara Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah	31
F. Hukum Musaqah Sahih dan Musaqah Fasid (rusak).....	32
G. Berakhirnya akad Musaqah.....	34
H. Manfaat Musaqah.....	35
I. Usaha Agribisnis	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Musaqah pada Perkebunan Semangka kecamatan Tampan.....	41
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Musaqah pada Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani di Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Luas Wilayah Kecamatan Tampan Tahun 2012	15
TABEL II.2	Jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Kelurahan di Kecamatan Tampan Tahun 2012.....	15
TABEL II.3	Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan Akhir Tahun 2012	16
TABEL II.4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012 ...	17
TABEL II.5	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2012	19
TABEL II.6	Tempat Ibadah di Kecamatan Tampan.....	20
TABEL. II.7	Kebun Yang Dijadikan Objek Kerjasama	21
TABEL. IV.1	Kebun Yang Dijadikan Objek Kerjasama.....	41
TABEL. IV.2	Penentuan Batas waktu Kerjasama	42
TABEL. VI.3	Modal Dalam Kerjasama Antara Pemilik Kebun Dengan Petani.....	43
TABEL. IV.4	Sistem Yang Dipakai Dalam pembagian Lahan Pada kerjasama Antara pemilik Kebun Dan Petani	44
TABEL. IV.5	Membuat Kesepakatan Sebelum Kebun Berada Dipihak Petani.....	44
TABEL. IV.6	Bentuk Perjanjian kerjasama Antara Pemilik kebun Dengan Petani	45
TABEL. IV.7	Apakah Kerjasama Sesuai Dengan Kesepakatan.....	46
TABEL. IV.8	Terjadinya Penyimpangan Selama Bekerja	47
TABEL. IV.9	Kendala Yang di Alami Dalam Kerjasama	48
TABEL. IV.10	Penentuan pada Saat Kapan Laba Bagi Hasil di Sepakati .	49
TABEL. IV.11	Prosedur pembagian Hasil Antara Pemilik Kebun dengan Petani.....	51

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Gambaran Umum PT. Satri Langit Nusantara.....	19
B. Struktur Pengurus PT. Satri Langit Nusantara.....	29
C. Dasar Hukum Pendirian.....	29
D. Visi dan Misi PT. Satri Langit Nusantara.....	30
E. Kantor Cabang PT. Satria Langit Nusantara.....	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Ketentuan Perjanjian Pada Umumnya	31
1. Unsur-Unsur Perjanjian	31
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	33
3. Asas-Asas Perjanjian	35

B. Jenis-Jenis Perjanjian	36
1. Perjanjian Menurut Sumbernya	36
2. Perjanjian Menurut Namanya	37
3. Perjanjian Menurut Bentuknya	38
4. Perjanjian Timbal Balik	38
5. Perjanjian Cuma-Cuma Atau Dengan Alas Hak Yang Membebani	39
6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya	39
7. Perjanjian Dari Aspek Larangannya	39
C. Perjanjian Kerja	42
D. Pengertian Outsourcing	44
E. Dasar Hukum Outsourcing.....	45
1. Dasar Pelaksanaan Outsourcing.....	45
2. Syarat-Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diserahkan Kepada Pihak Lain	51
3. Syarat-Syarat Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing	53
4. Perlindungan Kerja	57
5. Pengaturan Hubungan Kerja Antara Tenaga Kerja Dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Outsourcing	67
6. Ketentuan Bagi Perusahaan Pengguna Jasa Tenaga Kerja Outsourcing	69
7. Syarat Penyedia Jasa Pekerja untuk Kegiatan Penunjang ...	70

8. Asas, Tujuan Dan Fungsi Serikat Pekerja Dalam	
Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja.....	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga	
Kerja Dalam Sistem Outsourcig (Alih Daya) di	
PT. Satria Langit Nusantara	75
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh	
PT. Satria Langit Nusantara Sebagai Penyedia	
Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Memberikan	
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerjanya.....	82
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh	
PT. Satria Langit Nusantara Untuk Menghadapi	
Hambatan-Hambatan Dalam Memberikan	
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerjanya.....	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezkinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberi rezki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Jika Allah SWT menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian, jangan sampai ia meninggalkan dan tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, karena Islam melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja.

Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian.¹

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya.² Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan Karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.³

Kemungkinan untuk mendapatkan rezki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang diberkati dengan kemampuan⁴. Disamping itu, ada hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. dengan hak ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang

¹ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 42

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 168

³ Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003), edisi 1, h. 66

⁴ Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Rajawali), Cet. Ket-1, Ed. 1, h. 47

tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang⁵.

Di sisi lain manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan, mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. ada orang yang memiliki barang, tapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tapi juga jasa dan keahlian (keterampilan). Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.⁶

Kerja sama ekonomi merupakan wujud dari kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan oleh interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam Fiqih Muamalah syari'ah Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan hak. Dan merupakan hukum syara' yang mengatur hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai bidang usaha (bagi hasil), pinjam-meminjam, sewa-menyewa,

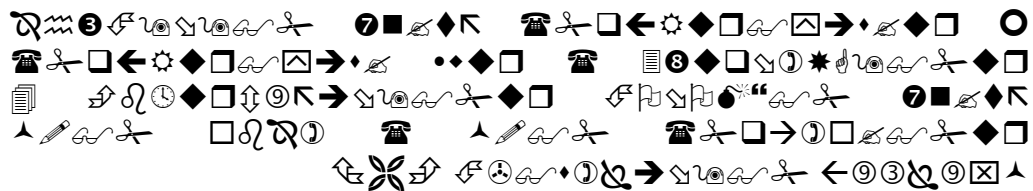
⁵ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, alih bahasa oleh: Faisal Saleh, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. Ket- 1 h. 489

⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 95

penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari⁷.

Kerjasama dalam bidang usaha agribisnis dikenal dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.⁸

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dengan prinsip bagi hasil terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :



Artinya :*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah [5]:2)

Dari ayat di atas, Allah SWT menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa..

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 169

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987), Cet. Ke-1, jilid 12, h. 159

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah kerjasama / sistem bagi hasil, baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu Musaqah. Musaqah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi musaqah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.

Definisi musaqah menurut para ahli fiqih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.⁹

Secara sederhana musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat¹⁰.

Usaha agribisnis di Pekanbaru yang menerapkan sistem bagi hasil dalam bentuk musaqah yaitu di kebun semangka yang berada di Kecamatan Tampan.

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Ahli Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad Ikhawani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Cet ke- 1, h. 476

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), edisi 1, cet 1, h. 109

Salah satu pemilik kebun semangka ini bernama Pak budi. Dia memiliki kebun semangka seluas 1 ha dengan 2000 batang semangka, karena luas kebun tersebut dia meminta orang lain untuk mengelolanya dengan bentuk musaqah. Pak budi mempekerjakan dua orang untuk mengelolah kebun tersebut. Kerjasama yang dilakukan Pak Budi dengan petani dilakukan dari membersihkan lahan, menanam, memupuk, menyiram, memelihara sampai masa panen. Pemilik kebun dan petani semangka akan berbagi hasil setelah panen dengan persentase dibagi tiga setelah dikurangi modal awal. Misalnya hasil panen mencapai 10 ton dengan harga per Kg Rp. 2000 maka hasil panen yang diterima Pak Budi Rp. 20.000.000, karena Pak Budi yang memiliki kebun dia mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000, dikurangi modal awal Rp. 7.000.000. Laba yang diperoleh Pak Budi sebesar Rp. 8.000.000 sisanya Rp. 5000.000, dibagi dua untuk petani dengan masing-masing mendapatkan Rp 2.500.000,¹¹

Contoh kasus lain yaitu pemilik kebun semangka bernama Pak Gimo memiliki kebun dengan luas $\frac{1}{2}$ ha. Sama halnya dengan Pak Budi, Pak Gimo juga bekerjasama dengan orang lain dalam mengelolah kebun tersebut. Pak Gimo mempekerjakan 1 orang petani dengan hasil dari panen akan dibagi dua dengan modal awal dari Pak Gimo setelah itu dibagi dua untuk petani. Dari hasil panen 5 ton, dengan harga per Kg Rp. 2000. Hasil panen yang diterima Pak Gimo Rp. 10.000.000, dikurangi modal Rp. 4.000.000 sisanya Rp.

¹¹Budi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 6 Januari 2013.

6.000.000 untuk Pak Gimo Rp. 4.000.000 untuk petani mendapatkan bagi hasil dari kerjasama sebesar Rp. 2.000.000 .¹²

Kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola. Sehingga para petani semangka bisa terbantu untuk memenuhi kehidupan ekonominya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM USAHA AGRIBISNIS ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Perkebunan Semangka di Kecamatan Tampan)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti, maka penulis membatasi permasalahan ini pada **“IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM USAHA AGRIBISNIS ANTARA PEMILIK KEBUN DAN PETANI PERKEBUNAN SEMANGKA DI KECAMATAN TAMPAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi musaqah pada perkebunan semangka di Kecamatan Tampan?

¹² Gimo (Pemilik kebun semangka). *Wawancara*, 6 Januari 2013

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka di Kecamatan Tampan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi musaqah pada perkebunan semangka di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka di Kecamatan Tampan.

2. Manfaat

- a. Sebagai sumbangan pemikiran khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam pada perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru.
- b. Dapat memberikan sumber informasi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca.
- c. Untuk penerapan ilmu pengetahuan bagi penulis yang didapat selama di bangku perkuliahan.
- d. Salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kebun semangka Kecamatan Tampan, yang berlokasi di jalan naga sakti, jalan melati. Adapun yang menjadi pertimbangan lokasi ini dijadikan lokasi penelitian karena perkebunan tersebut menggunakan sistem musaqah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kebun dan petani semangka di Kecamatan Tampan. Sedangkan objeknya penelitian ini adalah implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani semangka.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun semangka dan petani yang ada di Kecamatan Tampan dimana pada saat penelitian terdapat 7 orang pemilik kebun dan petani yang bekerja berjumlah 11 orang, total keseluruhan berjumlah 18 orang, karena populasinya terbatas maka seluruh populasi dijadikan sample dengan menggunakan *teknik total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu pemilik dan petani kebun semangka. Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti buku bacaan, diktat, internet dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati subjek dan objek penelitian.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada subjek untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari pemilik dan petani kebun semangka.

c. Dokumentasi

Penulis mendokumentasikan dengan foto kegiatan yang dilakukan di lapangan.

6. Metode Analisa

Analisa yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan antara satu data dengan yang lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis akan mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan pendapat-pendapat secara umum, kemudian diuraikan lalu diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu membahas masalah yang dimulai dari keterangan yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dengan apa adanya dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan penelitian. Kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum kecamatan Tampan, terdiri dari : letak geografis dan demografi, penduduk, perekonomian, pendidikan, keagamaan, dan daftar nama pemilik kebun semangka.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUSAQAH

Dalam bab ini membahas tentang pengertian musaqah, dasar hukum musaqah, rukun dan syarat musaqah, tugas penggarap, perbedaan musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah, hukum musaqah sah dan musaqah fasid (rusak), berakhirnya akad musaqah, manfaat musaqah, dan usaha agribisnis.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian. Diantaranya implementasi musaqah pada perkebunan semangka di Kecamatan Tampan, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara

pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka di Kecamatan Tampan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian .

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografi

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199,792 \text{ km}^2$.

Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kecamatan tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara $0^{\circ}42'$ - $0^{\circ}50'$ Lintang Utara dan Antara $101^{\circ}35'$ - $101^{\circ}43'$ Bujur Timur.

TABEL II.1**Luas Wilayah Kecamatan Tampan Tahun 2012**

N0	Kelurahan	Luas (KM ²)
1	Simpang Baru	23,59
2	Sidomulya Barat	13,69
3	Tuah Karya	12,09
4	Delima	10,44
	Jumlah	59,81

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa luas Kelurahan Simpang Baru adalah 23,59 km², luas Kelurahan Sidomulyo Barat adalah 13,69 km², sedangkan luas Kelurahan Buah Karya adalah 12,09 km², dan luas wilayah Kelurahan Delima adalah 10,44 km². Total luas wilayah Kecamatan Tampan secara keseluruhan adalah 59,81 km².

TABEL II. 2**Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012**

Ibu Koto Kecamatan	Kelurahan	Jarak Lurus (Km)
Tampan	Simpang Baru	1
	Sidomulyo Barat	3
	Tuah Karya	2
	Delima	3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Kelurahan SimpangBaru adalah 1 km, jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Kelurahan Sidomulyo Barat adalah 3 km, jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Buah Karya adalah 2 km, sedangkan jarak Ibu Kota Kecamatan dengan Kelurahan Delima 3 km.

B. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu factor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik 2012 di kecamatan Tampan secara keseluruhan penduduk berjumlah 175.634 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini.

TABEL II. 3

**Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Dan Jenis Kelamin
Di Kecamatan Tampan Akhir Tahun 2012**

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SimpangBaru	21.326	22.482	43.808
Sidomulyo Barat	22.324	21.039	43.363
TuahKarya	28.783	26.760	55.543
DElima	16.911	16.009	32.920
Jumlah	89.344	86.290	175.634

Sumber Data: Badan Pusat Statisti

Berdasarkan klasifikasi penduduk Kecamatan Tampan menurut Kelurahan dan jenis kelamin adalah di Kelurahan Simpangbaru laki – laki berjumlah 21.326 orang dan perempuan 22.482 orang, di Kelurahan Sidomulyo Barat laki – laki berjumlah 22.324 orang dan perempuan berjumlah 21.039 orang, di Kelurahan TuahKarya jumlah laki – laki adalah 28.783 orang dan perempuan 26.760 orang. Sedangkan di Kelurahan Delima laki – laki berjumlah 16.911 orang dan perempuan berjumlah 16.009 orang.

TABEL II. 4
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tampan Tahun 2012

Kelurahan	Luas(km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Tiap km ²
SimpangBaru	23,59	43.808	1.857
SidomulyoBarat	13,69	43.363	3.167
TuahKarya	12,09	55.543	4.594
Delima	10,44	32.920	3.153
Jumlah	59,81	175.634	2.936

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan luas Kecamatan Tampan adalah 59,81 km², dengan jumlah penduduk 175.634 orang dan rata – rata kepadatan penduduk setiap Kelurahan adalah 2.936 km².

Jika dilihat dari jumlah penduduk Kelurahan, Kelurahan Tuah Karya yang penduduk terbanyak yaitu 55,543 jiwa, di Kelurahan Delima mempunyai penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk 32,920 jiwa.

C. Perekonomian

Sebagian besar kepala rumah tangga di Kecamatan Tampan bekerja pada sektor perdagangan, sebanyak 23,390 kepala rumah tangga atau 52,07persen bekerja pada sektor ini, 9.03 persen bekerja pada sektor jasa dan selebihnya bekerja pada sektor-sektor yang lain.

Aktivitas perekonomian disuatu wilayah salahsatu ditandai dengan banyak sedikitnya fasilitas perekonomian yang terdapt di wilayah tersebut pasar, pertokan, kios dan sejenisnya. Tempat-tempat ini merupakan unsur penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Pada tahun 2011, di Kecamatan Tampan terdapat 22 bank 3,662 toko/ warung/ kios

dan dua pasar (pasar yang beroperasi pada hari-hari tertentu saja) berlokasi di Kelurahan Karya.

D. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Jumlah sekolah di Kecamatan Tampan pada periode 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan. Jumlah TK Swasta pada tahun 2010 sebanyak 34 sekolah menjadi 48 sekolah pada tahun 2012, sedangkan TK negeri tetap jumlah 1 sekolah. Sedangkan SD Swasta pada tahun 2010 sebanyak 11 sekolah dan pada tahun 2012 menjadi 17 sekolah.

Dalam rangka meningkat kualitas sumber daya manusia dan pencapaian program belajar 9 tahun, seyogyanya akses terhadap fasilitas pendidikan semakin dipermudah. Di masing-masing Kelurahan di Kecamatan Tampan telah terdapat Sekolah Dasar, bahkan ada beberapa Kelurahan yang memiliki lebih dari 1 Sekolah Dasar. Sementara 3 Sekolah Menengah Pertama terdapat di Kelurahan Simpang Baru, 1 Sekolah Menengah Pertama terdapat di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Statistik Pendidikan Kecamatan Tampan Tahun 2010-2012

Indikator	2010	2011	2012
Jumlah Sekolah			
TK	35	40	49
SD	26	28	34
SMP/MTS	13	15	15
SMU/SMK/MA	12	12	13
Jumlah Guru			
TK	196	262	249
SD	627	495	698
SMP/MTS	369	352	390
SMU/SMK/MA	462	455	648
Jumlah Murid			
TK	1.693	2.442	2.307
SD	14.230	16.053	16.295
SMP/MTS	4.591	4.424	4.565
SMU/SMK/MA	4.918	4.184	3.326

Sumber: Badan Pusat Statistik

E. Keagamaan

Dalam masalah agama di daerah ini, penduduknya sebagian besar menganut agama Islam. Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II. 5
Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Tampan
Tahun 2012

Kelurahan	Pemeluk Agama				
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
Simpang Baru	39.763	754	3.011	44	234
Sidomulyo Barat	39.439	766	2.642	57	452
Tuah Karya	52.755	596	2.057	0	134
Delima	29.368	659	2.426	27	431
Jumlah	161.325	2.775	10.136	128	1.251

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari kondisi keagamaan, tercatat sebagian besar penduduk Kecamatan Tampan Beragama Islam Yaitu sebanyak 161.325 jiwa, kemudian

yang beragama Katolik sebanyak 2.775 jiwa, penduduk yang beragama Protestan sebanyak 10.136 jiwa sementara beragama Hindu sebanyak 128, agama Budha sebanyak 1,251 jiwa, dan agama lainnya sebanyak 19 jiwa.

TABEL II. 6
Tempat Ibadah di Kecamatan Tampan Tahun 2012

Kelurahan	Tempat Ibadah				
	Masjid	Surau/Langar	Gereja	Pura	Vihara
Simpang Baru	30	15	7	0	0
Sidomulyo Barat	23	18	0	0	0
Tuah Karya	31	25	0	0	0
Delima	21	9	2	0	1
Jumlah	105	67	9	0	1

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel diatas jumlah masjid di Kecamatan Tampan berjumlah 105, jumlah Surau/Langgar 67, jumlah Gereja 9, jumlah Pura 0, dan Vihara berjumlah 1.

F. Daftar Nama Pemilik Kebun Semangka

Kebun yang dijadikan objek kerjasama antara pemilik kebun dan petani yakni dalam bentuk kerjasama dibidang perkebunan semangka. Dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL. II. 7
Kebun Yang Dijadikan Objek Kerjasama

No	Pemilik kebun	Luas kebun (Ha)	Petani Penggarap
1	Waldi	1,5 Ha	2
2	Paijo	1 Ha	1
3	Gimo	½ Ha	1
4	Budi	1,5 Ha	2
5	Midi	1,5 Ha	2
6	Andik	1,5 Ha	2
7	Fandir	1 Ha	1
	Jumlah	8,5 Ha	11

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pemilik kebun memiliki luas kebun 1,5 Ha dengan 2 orang petani yang bekerja dalam penyiraman dan pemeliharaan. Sedangkan yang memiliki kebun 1 Ha mempekerjakan satu orang.¹³

¹³Waldi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 10 Januari 2013.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MUSAQAH DAN AGRIBISNIS

A. Pengertian Musaqah

Musaqah berasal dari kata *Saqa – Saqy* yang berarti *As-Saqy* yang artinya penyiraman atau pengairan.¹⁴ Supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁵

Menurut syariat musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. Musaqah adalah kerjasama (syirkah) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya.¹⁶

Secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-muamalah*. Secara terminologi, musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqh sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, 2002, hlm. 642.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 145

¹⁶ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), h. 129

Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Ulama Syafi’iyah mendefenisikan *musaqah* mempeketjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap.¹⁷

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁸

Defenisi *musaqah* menurut para ahli fiqih adalah menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah, kepada seseorang yang menanam dan merawatnya ditanah tersebut (seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemiliknya.¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), edisi 1, cet 1, h. 109

¹⁸ Ibid, h. 110

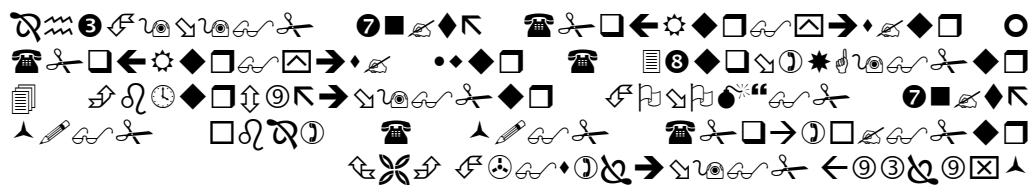
¹⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Ahli Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad Ikhawani, dan Budiman Mustofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) Cet ke- 1, h. 476

B. Dasar Hukum Musaqah

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan hasilnya yang belum tentu.

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah. Adapun dasar hukum kebolehan ini adalah perbuatan Rasulullah dan Khulafah Rasyidin setelahnya. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Umar bahwa Nabi SAW menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separuh dari yang dihasilkan dari lahan itu.²⁰

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dalam firman Allah SWT sebagai berikut :



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah [5]:2)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan

²⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *konsep hidup ideal dalam islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006)

mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut. Jumhur ulama membolehkan akad musaqah karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak adahal yang dirugikan.

Hukum musaqah adalah boleh (mubah)²¹, bahkan sebagai para ulama fiqih menyebutkan sebagai sunnah, sabda rasulullah saw :

عن أبي هريرة قال: قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين اخواننا انخيل.

. : . : .

()

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia menuturkan. “Orang-orang Anshor berkata kepada Nabi SAW. “Bagikan kepada kami saudara-saudara kami kebun kurma itu. Beliau menjawab, Tidak. Kemudian mereka (kaum Muhajirin) berkata. Kalian membantu pekerjaan kami dan kami

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*, h.110

sertakan kalian pada pendapatan buahnya. Maka mereka berkata. Kami mendengar dan kami patuh.” (HR. AL-Bukhari)²²

Ibn Rusyd juga mengemukakan dasar hukum musaqah berdasarkan kepada jumhur fuqaha yang berpegang kepada Hadist shahih Ibn Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما, ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر اوزرع . ()

Artinya: “*Dari Ibn Umar RA, bahwasanya Nabi mempekerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan upah separoh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan itu. (HR. Muslim)*”.²³

Dalam sebagian riwayatnya, “Bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan musaqah dengan mereka dengan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”.²⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan praktik musaqah selama masa hidup beliau dengan penduduk Khaibar. Beliau mempekerjakan mereka untuk mengurus lahan pertanian dengan imbalan separuh dari hasil panen.

Disamping itu akad musaqah ini dibutuhkan manusia karena terkadang disatu pihak pemilik perpohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mampu dan

²² Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan shahih bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 122

²³ Muhammad Nasruddin Al AlBani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta:Pustaka azzam, 2007), h. 686

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahidwa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 485

sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut, dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap sedangkan pihak lain memerlukan pekerjaan.²⁵

C. Rukun dan Syarat Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun Musaqah ada lima, yaitu berikut ini :

1. Dua orang yang akad (*Al-Aqidani*). *Al-Aqidani* disyaratkan harus baligh dan berakal.
2. Objek Musaqah, objek Musaqah menurut ulama *Hanafiah* adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama *Hanafiah* lainnya dibolehkan Musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman. Objek musaqah menurut ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa objek musaqah adalah tumbuh-tumbuhan, seperti pohon yang berbuah dan yang memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat:
 - 1) Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan.
 - 2) Akad ditentukan dengan waktu tertentu.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010) Cet., h. 406

Menurut Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa Musaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.

Ulama *Syafi'iyah* dalam madzhab baru berpendapat bahwa Musaqah hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya.

3. Buah, disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
4. Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika di syartkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzara'ah maupun musaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermualah dengan orang Khaibar.
5. Shigha, menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkan sebab ang terpenting adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah. Menurut ulama Hanabilah, sebagaimana pada *muzara'ah*, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.²⁶

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h 214-216

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
2. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut Ulama hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, terong. Akan tetapi, ulama hanafiyah mengakhiri menyatakan, musaqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawijaya, seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat:

- 1) Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad musaqah adalah kurma dan anggur.

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafo'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang)
5. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.²⁷

D. Tugas Penggarap

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.²⁸

Kewajiban penyiraman (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaan untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon – pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*, h. 112

²⁸ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 158

Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (insidental), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengandaan bibit).²⁹

E. Perbedaan antara Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah

Musqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, dimana muzara'ah yaitu kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah sering kali diidentikkan dengan mukhabarah, diantar keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam muzara'ah benih dari pemilik lahan sedangkan dalam mukhabarah benih dari penggarap.³⁰

Ulama Hanfiah berpendapat bahwa musaqah, sama dengan muzara'ah, kecuali dalam empat perkara:

1. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam musaqah, ia harus dipaksa, tetapi dalam muzara'ah, ia tidak boleh dipaksa.

²⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 150

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, h. 99

2. Jika waktu musaqah habis, akad diteruskan sampai buah berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam muzara'ah, jika waktu habis pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Waktu dalam musaqah ditetapkan berdasarkan *istihsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam muzara'ah terkadang tidak tertentu.
4. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah. Sedangkan dalam muzara'ah jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.³¹

F. Hukum Musaqah Sahih dan Musaqah Fasid (rusak)

Hukum musaqah sahih menurut ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sahih adalah berikut ini:

- 1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- 2) Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- 6) Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati.

³¹ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 213

7) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap tersebut, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.³²

Para ulama sepakat bahwa musaqah apabila terjadi dalam kondisi yang tidak dibolehkan oleh syariat maka musaqah tersebut menjadi batal, selama tidak hilang kesepakatan untuk mengerjakannya.³³ Bagi penggarap yang tidak mampu bekerja karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh (rusak) ini tentunya bila dalam akad disyaratkan harus penggarapnya sendiri yang mengerjakan, sebaliknya bila tidak disyaratkan tentulah tidak menjadi fasakh, tapi penggarap harus mencarikan ganti untuk menggarapnya.³⁴

Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan musaqah fasid menurut ulama Hanafiyah, antara lain :

- 1) Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad.
- 2) Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.

³² *Ibid* 217

³³ Ibn Rusyd, *Op.Cit*, h. 494

³⁴ A. Syafii Jafri, *Lop. Cit*

- 3) Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- 4) Mensyaratkan dalam pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang akad.
- 5) Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.
- 6) Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- 7) Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- 8) Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.³⁵

G. Berakhirnya akad Musaqah

Menurut para ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, mak

³⁵ Rahmat Syafei, *Op. Cit* 217

pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.

Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.³⁶

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan musaqah sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya. Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa musaqah dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.³⁷

H. Manfaat Musaqah

Ada beberapa hikmah dari dibolehkannya praktik musaqah, terutama dalam perawatan lahan pertanian yang menjadi objek musaqah tersebut. Dengan adanya akad musaqah, lahan tersebut tidak menjadi lahan yang terlantar karena adanya orang yang mengelola dan merawatnya. Dengan

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h.113

³⁷ Rachmat Syafei, *Op. Cit*, h.221

demikian, ada pemeliharaan tanah bagi pemilik dan ada keuntungan bagi penggarap. Hal ini melahirkan kerja sama yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, sehingga seperti telah dijelaskan di atas, merupakan bentuk kerja sama dalam kebaikan apabila dilandasi dengan niat yang baik.

Dalam hal ini ada dua hikmah

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga bisa mencukupi kebutuhannya
2. Saling tukar manfaat di antara manusia.

Selain itu, ada pula beberapa faedah lain dari kebolehan musaqah ini, yaitu pohon-pohon di kebun tersebut dapat hidup dan menghasilkan, karena penggarap telah berjasa merawat dan mengelolanya. Jika pohon-pohon tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dirawat, tentunya ada kemungkinan pohon-pohon tersebut akan mati dalam waktu singkat. Faedah lain adalah adanya ikatan rasa cinta kasih sayang antara sesama manusia, sehingga umat dapat menjadi umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan bersama, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.³⁸

I. Usaha Agribisnis

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.³⁹ Dalam

³⁸ Ibid, h. 113-114

³⁹ Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, h. 159

Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁴⁰

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Bussiness is the organized effort of individuals to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴¹

Menurut Arsyad dkk. (1985), yang dimaksudkan dengan agribisnis adalah Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud dengan ada hubungannya dengan pertanian dalam artian yang luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.⁴²

Agribisnis dikenal diluar negeri sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Di Indonesia, agribisnis baru populer sejak 1990. Padahal kegiatan agribisnis sudah dilakukan sejak dahulu. Kini yang perlu di upayakan adalah bagaimana

⁴⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 27

⁴¹ Buchari Alma, *Dasar – Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h. 89

⁴² Soekartawi, *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*, Edisi 1, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) h. 2

semua pihak memiliki persepsi yang sama mengenai agribisnis, mulai kegiatan pra produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi.

Pandangan tentang agribisnis secara umum dianggap tepat sudah semakin meluas, yaitu mencakup seluruh sistem produksi dan distribusi bahan pangan. Beberapa definisi agribisnis lainnya antara lain :

- a. Suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang luas, yaitu kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.
- b. Sebuah sistem kegiatan yang meliputi tiga komponen the farm input sector, the farming sector, dan the product marketing sector.
- c. Keseluruhan dan kesatuan dari seluruh organisasi dan kegiatan mulai dari produksi dan distribusi sarana produksi, kegiatan produksi pertanian dilahan pertanian sampai dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan turun sampai distribusi hasilakhir dari pengolahan tersebut kekonsumen.
- d. Agribisnis meliputi semua aktivitas sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri dari (1) sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian, (2) subsistem produksi pertanian atau usaha tani, (3) subsistem pengolahan hasil – hasil pertanian atau agroindustri, dan (4) subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian.⁴³

⁴³Ali Musa Pasaribu, *Kewirausahaan Berbasis Agribisnis*, Edisi 1, (Yogyakarta : Andi, 2012), h. 11

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Musaqah pada Perkebunan Semangka kecamatan Tampan

Secara teknis kerjasama dalam bidang perkebunan atau agribisnis sudah lama dilakukan di Indonesia. Sudah banyak dari hasil panen yang dihasilkan dari kerjasama itu, baik kerja sama dalam penggarapan lahan atau pemeliharaan kebun. Kerjasama yang dianjurkan adalah kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam konteks ini, pemilik kebun dan petani akan berbagi hasil setelah panen atas buah yang telah dihasilkan. Kerjasama ini dinamakan akad Musaqah.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Pekanbaru, dimana terdapat perkebunan semangka yang melakukan kerjasama yang dalam islam dikenal dengan akad musaqah. Pemilik dari kebun tersebut bernama Mas waldi, Pak Paijo, Pak Budi, Pak Gimo, Pak Midi, dan Mas Andik.⁴⁴

1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi

Pihak yang melakukan akad kerjasama ini adalah pemilik kebun dengan petani. Yang masing-masing melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

⁴⁴Waldi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 10 Januari 2013.

Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan petani, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya kebun diserahkan atas dasar kepercayaan kepada petani. Kebun disediakan oleh pemilik kebun dan tenaga dari petani.

Dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan petani, karena dalam perjanjian kerjasama tersebut ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik kebun dan petani.

- a. Kewajiban bagi pemilik kebun adalah menanggung modal atau seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk dan benih.
- b. Kewajiban bagi petani adalah:
 - a) Segala operasional yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau dengan menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelola tanah, tanaman, dan pengairan.
 - b) Memberi pupuk.
 - c) Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil.
 - d) Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.

Didalam pembagian laba mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik kebun yang menanggung modal dan keseluruhan biaya-biaya yang

berhubungan dengan proses pemeliharaan, sedangkan petani hanya mengeluarkan tenaga dalam memelihara dan perawatan.

Masing-masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam penggarapan sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

2. Kebun yang Dijadikan dalam Objek Kerjasama

Kebun yang dijadikan objek kerjasama antara pemilik kebun dan petani yakni dalam bentuk kerjasama dibidang perkebunan semangka. Dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL. IV. 1
Kebun Yang Dijadikan Objek Kerjasama

No	Pemilik kebun	Luas kebun (Ha)	Petani Penggarap
1	Waldi	1,5 Ha	2
2	Paijo	1 Ha	1
3	Gimo	½ Ha	1
4	Budi	1,5 Ha	2
5	Midi	1,5 Ha	2
6	Andik	1,5 Ha	2
7	Fandir	1 Ha	1
	Jumlah	8,5 Ha	11

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pemilik kebun memiliki luas kebun 1,5 Ha dengan 2 orang petani yang bekerja dalam penyiraman dan pemeliharaan. Sedangkan yang memiliki kebun 1 Ha mempekerjakan satu orang.⁴⁵

⁴⁵ Paijo (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 10 Januari 2013.

3. Bentuk / Jenis Usaha Yang Dilakukan.

Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Berdasarkan wawancara penulis dengan petani.

Dimana para petani hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan, segala bentuk keperluan selama masa pemeliharaan disediakan oleh pemilik kebun⁴⁶.

4. Menentukan Batas Waktu

Batas waktu dalam proses pemeliharaan kebun ditentukan, pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dipelihara sampai masa panen. Berdasarkan wawancara penulis dengan petani kebun semangka, mereka menyatakan menggunakan batas waktu sampai masa panen.⁴⁷ Untuk mengetahui tentang batas waktu dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL. IV. 2
Penentuan Batas waktu Kerjasama

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Menggunakan batas waktu	11	100%
2	Tidak menggunakan batas waktu	0	0%
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

⁴⁶ Andi (petani kebun semangka), *Wawancara*, 13 Januari 2013

⁴⁷ Licin (petani kebun semangka), *Wawancara*, 10 Mei 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan atau (100%) petani semangka mengatakan dalam kerjasama tersebut ditentukan batas waktunya. Hal ini disebabkan pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dipelihara sampai masa panen.

5. Modal

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun semangka, menyatakan asal modal dari pemilik kebun dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL. VI. 3
Modal Dalam Kerjasama Antara
Pemilik Kebun Dengan Petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Pemilik kebun	7	100%
2	Petani	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 7 atau (100%) pemilik kebun mengatakan bahwa modal dalam kerjasama tersebut berasal dari pemilik kebun, tidak ada modal dari petani. Petani hanya diperkenankan merawat serta memelihara kebun⁴⁸.

6. Sistem Pembagian Laba

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan petani semangka. Menyatakan sistem pembagian laba pada kerjasama antara pemilik kebun dan petani dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴⁸Budi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 10 Mei 2013.

TABEL. IV. 4
Sistem Yang Dipakai Dalam pembagian Lahan Pada kerjasama
Antara pemilik Kebun Dan Petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Upah	-	-
2	Bagi Hasil	11	100%
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa 11 atau (100%) petani mengatakan bahwa pembagian laba dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani memakai sistem bagi hasil. Sistem ini lebih adil karena kedua belah pihak sama-sama menikmati laba dan rugi, sistem tersebut berlaku sejak lama dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani⁴⁹.

7. Membuat Kesepakatan Sebelum Kebun di Pihak Petani

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan petani kebun semangka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL. IV. 5
Membuat Kesepakatan Sebelum Kebun
Berada Dipihak Petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Membuat Kesepakatan	11	100%
2	Tidak Membuat Kesepakatan	-	-
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 11 atau (100%) petani yang membuat suatu perjanjian sebelum kebun tersebut diserahkan kepada petani.

⁴⁹Agus (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 13 Mei 2013.

Hal ini dikarenakan dalam melakukan perikatan apapun, pasti ada suatu perjanjian termasuk dalam kerjasama antara pemilik kebun dan petani⁵⁰.

8. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan petani kebun semangka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL. IV. 6
Bentuk Perjanjian kerjasama
Antara Pemilik kebun Dengan Petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Lisan	11	100%
2	Tulisan	-	-
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas ada 11 atau (100%) responden yang menyebutkan perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan. Hal ini disebabkan karena mereka sudah saling kenal-mengenal dan saling percaya⁵¹. Pemilik kebun yang bernama Waldi melakukan kerjasama dengan petani yang bernama Licin dan Tomi, dalam kerjasama tersebut perjanjiannya berbentuk tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tersebut juga terjadi pada pemilik Kebun yang bernama Gimo dengan petani yang bernama Budin.

Bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani yaitu lisan, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya, tetapi ada baiknya segala bentuk urusan apalagi dalam hal kerjasama dibuat secara tertulis sehingga ada kekuatan hukum apabila kelak

⁵⁰ Amin (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 22 April 2013.

⁵¹ Warno (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 10 Mei 2013.

terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyangkut urusan dalam kerjasama tersebut.

Kemudian untuk mengetahui pendapat petani tentang perlukan mereka jika perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis, dapat dilihat pada tabel berikut

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kerjasama antara pemilik kebun dengan petani sesuai dengan kesepakatan⁵², maka dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan petani pada tabel berikut:

TABEL. IV. 7
Apakah Kerjasama Sesuai Dengan Kesepakatan

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Sesuai Dengan Kesepakatan	8	72,73%
2	Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan	3	27,27%
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 8 atau (72,73%) petani yang mengatakan bahwa kerjasama antara pemilik kebun dan petani sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya selisih paham antara pemilik kebun dengan petani dalam kerjasama tersebut karena adanya keterbukaan dari kedua belah pihak selama kerjasama tersebut berlangsung⁵³.

Selanjutnya ada 3 atau (27,27%) petani yang mengatakan bahwa kerjasama antara pemilik kebun dengan petani tidak sesuai dengan

⁵² Dirman (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 13 Mei 2013.

⁵³ Asril (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 12 Mei 2013.

perjanjian. Hal ini disebabkan karena ada petani menyimpang dari perjanjian, seperti tidak amanah dalam pembagian hasil.

Selain itu untuk mengetahui apakah pernah terjadi penyimpangan dalam kerjasama, dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun pada tabel berikut:

TABEL. IV. 8
Terjadinya Penyimpangan Selama Bekerja

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Ada penyimpangan	2	28,57%
2	Tidak Ada Penyimpangan	5	71,43%
	Jumlah	7	100%

Sumber Data: hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat dilihat 2 atau (28,57%) dari 7 orang pemilik kebun mengatakan bahwa pernah terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejujuran dari pihak petani, sehingga mempengaruhi pembagian hasil, karena pemilik kebun mendapat bagian kurang dari semestinya⁵⁴.

Kasus ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik kebun yang bernama Paijo, dimana Pak paijo menyerahkan kebun semangkanya kepada petani yang bernama Dirman. Pada waktu panen, kebun yang dirawat Pak Dirman menghasilkan 10 ton semangka, karena Pak Dirman kurang amanah dia memberitahu kepada pemilik kebun kurang dari jumlah hasil panen yang ada yang seharusnya. Sehingga dengan cara seperti itu, pemilik kebun merasa dirugikan dan jika mendapat keuntungan, maka

⁵⁴Paijo (pemilik kebun semangka), Wawancara, 12 Mei 2013.

keuntungannya tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia dapatkan. Kemudian 5 atau (71,43%) pemilik kebun yang mengatakan tidak terjadi penyimpangan selama kebun tersebut berada dipihak petani.

Penyimpangan yang terjadi selama kerjasama antara pemilik kebun dengan petani ini dikarenakan kurangnya keterbukaan atau transparansi petani kepada pemilik kebun, hal ini selain dapat mempengaruhi pembagian hasil juga dapat mempengaruhi hilangnya kepercayaan pemilik kebun terhadap petani.

Dalam kerjasama ini juga pemilik kebun mengalami berbagai kendala. Untuk mengetahui kendala tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1V. 9
Kendala Yang di Alami Dalam Kerjasama

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Kepercayaan Petani	4	57,14%
2	Tanggungjawab Petani	3	42,86%
	Jumlah	7	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

Dari tabel diatas 4 atau (57,14%) pemilik kebun mengatakan kendala yang dialami oleh pemilik lahan dalam kerjasama adalah masalah kepercayaan petani⁵⁵. Maksudnya adalah mempunyai kemampuan, petani atau penggarap memiliki kemampuan dan bisa meyakinkan pemilik kebun untuk penyiraman dan pemeliharaan kebun.

⁵⁵Midi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 22 April 2013.

Kemudian ada 3 (42,86%) pemilik kebun yang mengatakan kendala yang dialami dalam kerjasama adalah tanggungjawab petani. Maksudnya adalah tanggungjawab petani dalam penyiraman, pemeliharaan, perawatan, pemberian pupuk, hingga hasil panen dari semangka tersebut⁵⁶.

Selain kendala pemilik kebun yang dialami dalam kerjasama, ada juga kendala yang dialami petani pada saat pemeliharaan. Kendala yang sering dialami pada saat pemeliharaan dan perawatan adalah keadaan alam. Terkadang tidak menentunya cuaca yang terjadi yang dapat mengakibatkan kurugian, seperti curah hujan berkepanjangan, karena semangka membutuhkan iklim yang hangat dan untuk pertumbuhannya membutuhkan lebih banyak panas. Curah hujan yang ideal 40-50 mm/bulan dan seluruh areal pertanaman perlu sinar matahari sejak terbit sampai tenggelam.⁵⁷

Selanjutnya untuk mengetahui pada saat kapan penentuan laba bagi hasil disepakati antara pemilik kebun dengan petani dapat diketahui dari hasil wawancara penulis pada tabel berikut:

TABEL IV. 10
Penentuan pada Saat Kapan Laba Bagi Hasil di Sepakati

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Diawal Perjanjian	3	27,27%
2	Diakhir pada saat seluruh laba terkumpul	4	36,36%
3	Sesuai kesepakatan bersama	4	36,36%
	Jumlah	11	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara

⁵⁶ Andik (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 10 Januari 2013.

⁵⁷ Waldi (Pemilik kebun semangka), *Wawancara*, 13 Januari 2013.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 3 atau (27,27%) petani yang mengatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati pada saat diawal akad perjanjian. Hal ini disebabkan petani meminta kejelasan diawal sebelum kebun dilakukan pemeliharaan⁵⁸. Kemudian 4 (36,36%) petani yang megatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati diakhir pada saat keseluruhan laba terkumpul. Hal ini disebabkan karena masing-masing dari pemilik kebun dan petani ingin mengetahui berapa hasil keseluruhan dari panen semangka tersebut, setelah terkumpul dan mengetahui hasilnya barulah laba tersebut dibagikan⁵⁹. Selanjutnya sama dengan jumlah yang diatas ada 4 (36,36%) petani yang mengatakan bahwa penentuan laba bagi hasil disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak menjadi permasalahan diawal atau diakhir yang terpenting adalah kesepakatan kedua belah pihak dan kejujuran petani dalam pemeliharaan dan perawatan kebun⁶⁰.

Terdapat prosedur dalam pembagian laba antara pemilik kebun dan petani yang dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁸ Joni (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 10 Mei 2013.

⁵⁹ Budin (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 12 Mei 2013.

⁶⁰ Johan (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 12 Mei 2013.

TABEL IV. 11
Prosedur Pembagian Hasil
Antara Pemilik Kebun dengan Petani

No	Alternatif Jawaban	F	P
1	Hasil dikumpulkan semuanya terlebih dahulu kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemilik kebun dan petani sesuai kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian	8	72,73%
2	Hasilnya langsung dibagikan kepada pemilik kebun dan petani, sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman dahulu	3	27,27%
	Jumlah	11	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 8 atau (72,73%) petani yang memilih prosedur pembagian laba/bagi hasil antara pemilik kebun dan petani, yaitu laba/hasil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dikurangkan biaya-biaya selama perawatan tanaman dan sisanya dibagi kepada pemilik kebun dan petani sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian⁶¹. Hal ini disebabkan agar kedua belah pihak mengetahui berapa penghasilan bersih dari pemeliharaan dan perawatan kebun setelah dikurangi biaya-biaya⁶².

Kemudian ada 3 atau (27,27%) petani yang mengatakan bahwa prosedur pembagian laba/hasil antara pemilik kebun dengan petani yaitu, laba/hasilnya langsung dibagikan kepada pemilik kebun dan petani sesuai dengan kesepakatan tanpa pengurangan biaya-biaya perawatan tanaman

⁶¹licin (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 12 Mei 2013.

⁶²Andi (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 12 Mei 2013

terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pengurangan biaya-biaya ditanggung oleh pemilik kebun yang langsung sudah dikurangkan terlebih dahulu, artinya biaya-biaya perawatan pengolahan tanaman sudah ditanggung terlebih dahulu oleh pemilik kebun.⁶³

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Musaqah pada Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun dan Petani di Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan

Setelah mengadakan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani perkebunan semangka Kecamatan Tampan menimbulkan *grarar* (kesamaran). Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

⁶³Ade (Petani kebun semangka), *Wawancara*, 13 Mei 2013

Jadi muamalah yang diperintahkan oleh syara' untuk dikerjakan hendaklah dikerjakan dan jika dilarang mengerjakan hendaklah ditinggalkan.

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik. Hal ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya menghasilkan barang dan jasa dan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari suatu pekerjaan⁶⁴.

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian atau perkebunan, peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri⁶⁵. Dalam bentuk kerjasama dibidang perkebunan, dalam Islam disebut dengan sistem musaqah. Begitu juga dalam hal perjanjian bagi hasil, dimana perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik pada satu pihak pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut dengan penggarap. Dan berdasarkan perjanjian dimana penggarap dikenakan oleh pemilik untuk, menggarap kebun dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak⁶⁶.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan

⁶⁴ Jaribah Bin Ahmad Al- Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifah, 2006)

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003).Ed.1, Cet Ke-2

⁶⁶ Chairummah Pasaribu, *hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 32.

hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang telah ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Gambaran dari pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka Kecamatan Tampan menunjukkan adanya unsur *gharar*, dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk *gharar* yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu:

1. Prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan.
2. Petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh, seharusnya hal tersebut pemilik kebun mengetahuinya.

Islam memandang sangat penting menjaga hubungan muamalah karena dengan muamalah yang benar akan menciptakan hubungan keharmonisan antara sesama muslim. Didasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “*Dan dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*”.

Jadi idealnya perjanjian kerjasama dalam Islam seperti:

1. Prosedur perjanjian hendaknya tertulis.
2. Transparansi dalam pembagian hasil.
3. Kerjasama harus didasarkan adanya manfaat dalam menghindari diri dari timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Adanya jaminan dan syarat-syarat yang disebutkan diatas maka dalam muamalat perlu upaya-upaya agar pelaksanaan prosedur perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Kemudia dengan memperhatikan tentang pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dengan petani yang dilakukan

secara tidak tertulis atau lisan, sedangkan didalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila melaksanakan muamalah hendaknya ditulis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 282



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” .

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila setiap kali mengadakan prosedur perjanjian yang secara tidak tunai supaya melengkapi dengan alat bukti dasar untuk menyelesaikan persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

Adanya penyimpangan berarti tidak mematuhi prosedur perjanjian kerjasama, sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan supaya kita menepati janji. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

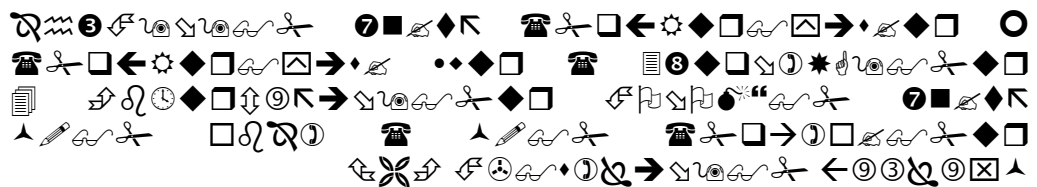
Firman Allah yang berkenaan dengan menepati janji juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 76



Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

Di dalam ayat diatas, Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk selalu menepati janji. Menurut hemat penulis menepati janji-janji yang mereka sepakati bersama adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia dan terhormat dalam kehidupan dan bergaul dalam masyarakat, menepati janji pada umunya dijadikan ukuran bagi kejujuran dan ketulusan hati. Sebaliknya mengingkari janji dipandang suatu kesalahan besar dan dapat merendahkan derajat seseorang dalam pandangan umum. Sehingga hilang kepercayaan orang kepadanya dan dia dimasukkan kedalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

Allah juga menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atau penderitaan orang lain. sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Islam membenarkan adanya kerjasama dan memerintahkan agar saling tolong-menolong antar sesama manusia. Disisi lain manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan, mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. ada orang yang memiliki barang, tapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tapi juga jasa dan keahlian (keterampilan). Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam dari salah satu aspek usahanya.⁶⁷

Penggunaan sistem kemitraan/ kerjasama bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini, karena menyuburkan kemampuan wirausaha dikalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada ouput, lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan.

Jadi implementasi musaqah pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka kecamatan tampan, belum sesuai dengan syariat Islam atau Ekonomi Islam, karena masih ada pelanggaran yang terjadi selama kerjasama tersebut.

⁶⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2003), h. 95

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat, dan membaca pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik kebun semangka dan petani adalah dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk di pelihara dan dirawat dan mereka mendapatkan bagian dari hasil kebun semangka sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dalam kerjasama ini modal disediakan seluruhnya oleh pemilik kebun. Tidak ada modal yang berasal dari petani, petani penggarap hanya bertanggungjawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun. Bentuk perjanjian dalam kerjasama ini tidak tertulis. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani atas dasar kepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung. Sehingga ada petani yang menyimpang dari perjanjian kerjasama in. Bagi petani yang tidak amanah, memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pengambilan keuntungan sendiri, yakni dengan melakukan penjualan buah semangka tanpa sepengetahuan pemilik kebun yang menyebabkan keuntungan tidak sesuai dengan apa yang semestinya didapatkan.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama antara pemilik kebun dan petani di perkebunan semangka Kecamatan Tampan, sudah sesuai

dengan syariat Islam akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang melanggar atau melakukan penyimpangan dari perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam bentuk kerjasamanya dibuat tidak tertulis dan pelaksanaannya menimbulkan unsur *gharar*(kesamaran), akibatnya terjadi penyimpangan dalam kerjasama terutama bagi petani yang tidak amanah.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun semangka dan petani yang terjadi di Kecamatan Tampan. Adapun saran-saran penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pemilik kebun hendaklah dalam suatu perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari, maka dapat terselesaikan dengan adanya bukti yang jelas.
2. Sebagai petani yang di amanahkan untuk memelihara dan merawat kebun yang bukan miliknya hendaklah memiliki sifat amanah, menepati janji dan menghormati apa yang menjadi hak orang lain.
3. Kepada praktisi dan Akademis khususnya Konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam , agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat Islam secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Rajawali
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, 2002
- Ali Musa Pasaribu, *Kewirausahaan Berbasis Agribisnis*, Edisi 1, Yogyakarta : Andi, 2012
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islam*, Bandung: CV. Alvabeta, 2003
- Chairummah Pasaribu, *hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahidwa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta : Kencana, 2006
- Jaribah Bin Ahmad Al- Haristsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khatab*, Jakarta: Khalifah, 2006
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

- Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Ringkasan shahih bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- _____ *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta:Pustaka azzam, 2007
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Ahli Bahasa Oleh: Abdul Hayyie al- Kattani, Ahmad Ikhawani, dan Budiman Mustofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Soekartawi, *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*, Edisi 1, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh: H. Kamaluddin A. Marzuki. (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987)
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazi'ri, *konsep hidup ideal dalam islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006)
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, ahli bahasa oleh : Faisal Saleh, dkk, cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)